



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

UNIT KERJA : BIDANG KESEKRETARIATAN BADAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AHMAD ZAKY**
2. Jabatan : **SEKRETARIS BADAN**
3. NHK : **741199**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 10.736.000.000**

1. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/206 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.982.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/110 m2 di KAB / KOTA
BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/107 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 571 m2/402 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , Rp. 923.500.000
7. Tanah Seluas 195 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp.
1.170.000.000
8. Tanah Seluas 407 m2 di KAB / KOTA WAJO, Rp. 610.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 74.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ALTIS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
65.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HADIAH Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 415.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.415.905.965
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.008.134.477
Sub Total	Rp.	13.649.040.442
III. HUTANG	Rp.	2.491.960.875
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.157.079.567

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.